

SKRIPSI

**DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN
MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

A.NUR FADILLAH



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2021

SKRIPSI

DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sajana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh:

A.NUR FADILLAH

A011171320



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2021

SKRIPSI

**DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh:

A.NUR FADILLAH

A011171320

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 01 November 2021

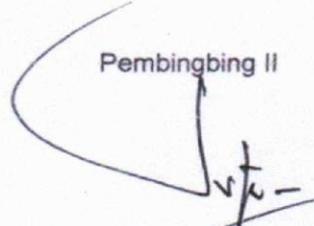
Pembimbing I



Dr. Sanusi Fattah, S.E, M.Si, CSF, CMW®

NIP. 196990413 199403 1 003

Pembimbing II



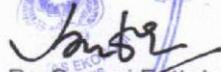
Dr. Sultan Suhab, S.E, M.Si

NIP. 19691215 199903 1 002

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi & Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE, M.Si, CSF, CWM®

NIP 19690413 199403 1 003

SKRIPSI

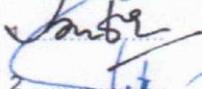
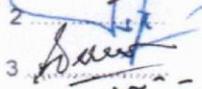
DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

A.NUR FADILLAH
A011171320

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **30 NOVEMBER 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
PanitiaPenguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	TandaTangan
1.	Dr. Sanusi Fattah, SE.,M.Si., CSF., CWM®.	Ketua	
2.	Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si.	Sekretaris	
3.	Prof. Dr. Nursini, SE., MA.	Anggota	
4.	Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA. Ph.D.	Anggota	



Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Sanusi Fattah, SE.,M.Si.,CSF.,CWM®
NIP 19690413 199403 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245
Telp. (0411) 583851, 585605 Pswt 2210, 2212, 2607, 2808 Fax. (0411) 587218
Webmail: <http://feb.unhas.ac.id> Email: feb@unhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **A.Nur Fadillah**
Nomor Pokok : A011171320
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UNHAS
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar, 30 November 2021
Yang Menyatakan



(A.Nur Fadillah)

No. Pokok: **A011171320**

PRAKATA



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah dan segala puji kehadirat Allah SWT atas segala rahmat hidayah, karunia dan anugerah-NYA sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa peneliti kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalani kehidupan di dunia.

Skripsi ini berjudul **“DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN”** disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat Strata satu (S1) pada Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dalam proses penulisan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan dukungan, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak baik itu langsung maupun tidak langsung. Skripsi ini juga tidak luput dari kekurangan dan kesalahan-kesalahan karena keterbatasan dari peneliti.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ayahanda A. Muhammad Yunus Arsyad dan Ibunda HJ. Sitti Fatimang yang telah banyak mendokan, mendidik dan membesarkan peneliti dengan setulus dan penuh kasih sayang tanpa batas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, menjaga dan memberikan kemuliaan atas semua tanggung jawab dan semua hal yang begitu sangat berarti yang telah dilakukan oleh beliau. Kepada seluruh keluarga besar yang tak sempat peneliti sebutkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan motivasi kepada peneliti.

Pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Prof. Dr. Hj. Mahlia Muis, S.E., M.Si. selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., AK., CA. Selaku wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Bapak Dr. H. Madris, S.E, DPS, M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si., CSF., CWM®. Selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E., M.Si., CWM®. Selaku sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Ayahanda Dr. Sanusi Fattah, S.E, M.Si., CSF., CWM®. Selaku dosen pembimbing I dan Ayahanda Dr. Sultan Suhab, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas arahan, bimbingan, saran dan waktu yang telah diberikan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini serta permohonan maaf yang sebesar- besarnya bilamana selama proses bimbingan skripsi peneliti secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang menyinggung perasaan Bapak-bapak dosen pembimbing. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan Bapak-bapak dosen pembimbing.
5. Ibu Dr. Fatmawati, S.E., M.Si., CWM® selaku penasihat akademik peneliti yang memberikan bantuan baik berupa arahan maupun motivasi kepada peneliti selama menjalankan studi di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

6. Ibu Prof. Dr. Nursini, S.E., M.A dan Bapak Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, M.A. Ph.D. selaku dosen penguji. Terima kasih telah memberikan motivasi dan saran bagi peneliti untuk terus belajar dan berusan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasihat kepada peneliti selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
8. Segenap Pegawai Akademik, Kemahasiswaan dan Perpustakaan E-Library Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan studi. Terima kasih terkhusus untuk Pak Aspar dan Pak Iwan yang telah banyak membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga dalam proses penyelesaian tugas akhir.
9. Sahabat sahabatku yaitu: Fadhilah Suriyanto dan Sri Hastuti Nurgani. Terima kasih sahabat-sahabat ku hingga saat ini telah memberikan segenap bantuan baik itu arahan serta pemikiran yang sangat membantu peneliti serta terima kasih telah menemani saat suka maupun duka selama kurang lebih 4 tahun terakhir. Semoga seterusnya kita terus menjalin pertemanan hingga tua nanti, Amiin ...
10. Teman-teman ERUDITE yang selalu memberikan semangat, dukungan, bantuan dan doa terkhususnya kepada Wfiqah Ulya, S.E, Annisya Amaliah Wirani, S.E, Ita Dahlia, S.E, Mar'atus Sholiha Amir dan semuanya yang tidak sempat disebutkan namanya. Terima kasih telah menemani saat suka maupun duka dalam berproses sebagai mahasiswa. Semoga cita-cita dan impian kita dapat tercapai. Tetap kompak dan tetap semangat, semoga semuanya SE secepatnya tanpa terkecuali, Aamiin...
11. Teman-teman PRIMES, ANTARES, LANTERN, GRIFFINS dan seluruh keluarga besar Ilmu Ekonomi dibawah naungan "Rumah Merah" HIMAJIE (Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi) yang peneliti tidak dapat sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini dan semoga tetap semangat dalam mencapai cita-cita terkhusus dalam menggapai tittle SE.

12. Teman-teman KKN Tematik Gel.104 SIDRAP 1, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dan penyemangan dalam menjalankan KKN Covid-19 selama kurang lebih satu bulan.
13. Sahabat-sahabat Whicless ku yaitu, Riska Ayu Azhari A.Md.Kes., dan Reggina Sulistyawati Makmur, terima kasih teman-teman SMP hingga sekarang dan Insya Allah seterusnya sampai maut memisahkan yang senantiasa menemani suka maupun duka dan memberikan dukungan dan bantuan baik itu arahan maupun doa yang sangat membantu peneli. Kelak semoga kita bisa sukses bersama dalam manggapai cita-cita, Aamiin..
14. Dan tentunya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan motivasi serta doa sehingga atas izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik bagi pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan referensi, manfaat, dan pengetahuan bagi kita semua. Aamiin..

Makassar, 30 November 2021

A.NUR FADILLAH

ABSTRAK

DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

A.Nur Fadillah

Sanusi Fattah

Sultan Suhab

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan melalui variabel intervening yaitu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan sumber-sumber lainnya berupa data panel yang terdiri dari data runtut waktu dari tahun 2014 hingga 2020 dan data cross sectional yang diperoleh dari 24 Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan adalah data alokasi belanja langsung pemerintah daerah, investasi daerah, laju pertumbuhan ekonomi, dan gini ratio pada masing-masing kab/kota yang ada di provinsi Sulawesi Selatan yang dianalisis menggunakan model analisis regresi simultan (Simultaneous Equation Model). Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode pengamatan, alokasi belanja langsung pemerintah daerah secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil lain menunjukkan bahwa investasi berpengaruh terhadap Ketimpangan pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan

ABSTRACT

Determinants Of Community Income Inequality in South Sulawesi

A.Nur Fadillah

Sanusi Fattah

Sultan Suhab

This study aims to analyze the effect of government expenditure and investment on income inequality through intervening variable, namely economic growth in South Sulawesi Province. This study uses secondary data obtained from Badan Pusat Statistik and other sources in the form of panel data consisting of time series data from 2014 to 2020 and cross sectional data obtained from 24 districts/cities in South Sulawesi Province. The data used are data on capital expenditure allocation, private investment, economic growth rate Regency/City in South Sulawesi Province which were analyzed using the Simultaneous Equation Model. The results showed that during the observation period the direct allocation of local government expenditures had a negative and significant effect on income inequality, while indirectly through economic growth had no effect on income inequality in South Sulawesi Province. Other results show that investment has an effect on income inequality either directly or indirectly through economic growth in South Sulawesi Province.

Keywords : Government Expenditure, Investment, Economic Growth, Income inequality

HALAMAN Sampul.....	i
HALAMAN Judul.....	ii
HALAMAN Persetujuan.....	iii
HALAMAN Pengesahan.....	iv
HALAMAN Pernyataan Keaslian.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan penelitian.....	9
1.4 Manfaat penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Teoritis.....	10
2.1.1 Ketimpangan Pendapatan.....	10
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	12
2.1.3 Belanja Langsung Pemerintah.....	15
2.1.4 Investasi.....	17
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	18
2.2.1 Belanja langsung Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	18

2.2.2 Belanja langsung Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi.....	20
2.2.3 Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	21
2.2.4 Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi.....	22
2.3 Penelitian Terdahulu.....	23
2.4 Kerangka Konseptual.....	27
2.5 Hipotesis Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Ruang Lingkup.....	29
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.3 Metode Analisis Data.....	29
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	34
4.1.1 Keadaan Geografis Provinsi Sulawesi Selatan.....	34
4.2 Perkembangan Umum Variabel Penelitian.....	34
4.2.1. Perkembangan Ketimpangan Pendapatan.....	34
4.2.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi.....	36
4.2.3 Perkembangan Belanja Langsung Pemerintah.....	38
4.2.4 Perkembangan Investasi.....	40
4.3 Hasil Estimasi.....	41
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	48
4.4.1 Pengaruh Belanja Langsung Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	48

4.4.1.1 Pengaruh Langsung.....	48
4.4.1.2 Pengaruh Tidak Langsung.....	50
4.4.2 Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	52
4.4.2.1 Pengaruh Langsung.....	52
4.4.2.2 Pengaruh Tidak Langsung.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu.....	28
4.1 Perkembangan Gini Ratio Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.....	35
4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.....	36
4.3 Hasil Regresi.....	42
4.4 Hasil Estimasi Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung.....	45

DAFTAR GAMBAR

1.1 Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Sulawesi Selatan.....	5
1.2 Perkembangan Belanja Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan.....	6
1.3 Perkembangan Investasi di Provinsi Sulawesi Selatan.....	7
2.1 Kurva Lorenz.....	12
2.2 Kerangka Konseptual.....	28
4.1 Perkembangan Belanja Langsung Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 dan 2020.....	38
4.2 Diagram Analisis Jalur Antar Variabel.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data yang digunakan.....	62
2. Output Regresi SPSS.....	69
3. Biodata.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antardaerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional antardaerah semakin besar. Indeks ketimpangan yang lazim dikenal dengan "Koefisien Gini" mencerminkan ketimpangan pendapatan rakyat dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) yang apabila skalanya mendekati angka satu, mencerminkan suatu ketimpangan sempurna.

Karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, maka tidak mengherankan bila pola pembangunan ekonomi wilayah di Indonesia tidak seragam. Ketidakseragaman ini akan berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada gilirannya akan mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Pertumbuhan ekonomi sering kali diikuti dengan perubahan struktur pendapatan, terutama bagi negara yang sedang berkembang. Masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia ialah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok

masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah.

Pemerataan distribusi pendapatan merupakan hal yang penting dalam sebuah negara. Pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak Negara Sedang Berkembang (NSB), tidak terkecuali di Indonesia. Ketimpangan tidak dapat dirumuskan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar kesehatan dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses pertumbuhannya. Karenanya, mengherankan ketimpangan itu pastinya selalu ada ada, baik itu di negara miskin, negara sedang berkembang, bahkan negara maju sekalipun. Hanya saja yang membedakan adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing tersebut.

Sofyan (2010) mengemukakan bahwa kegagalan pemerataan distribusi pendapatan tidak hanya berpengaruh buruk terhadap bidang perekonomian saja, tetapi juga sosial, politik dan keamanan. Ketimpangan pendapatan akan menyebabkan tumbuhnya kecemburuan sosial dan kemiskinan yang nantinya dapat berujung pada resiko terbesar seperti kerusuhan dan gerakan separatis. Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya

menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Seringkali di negara-negara berkembang dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal daripada tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan.

Ketimpangan juga dapat dipicu oleh perbedaan pembangunan antar daerah. Adanya disparitas antar daerah semakin diperparah akibat tidak efisiennya pemerataan daerah seperti mobilitas tenaga kerja, upah, dan investasi (Piotr, 2009). Ketimpangan pendapatan yang tinggi tidak hanya dipandang sebagai masalah, tetapi juga sebagai sumber timbulnya masalah baru. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutannya. Ketimpangan yang tinggi dapat menurunkan pertumbuhan karena rumah tangga yang berpendapatan tinggi merampas kemampuan rumah tangga berpendapatan rendah untuk tetap sehat dan mengakumulasi modal fisik dan manusia. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya investasi dalam pendidikan karena anak-anak miskin berakhir di sekolah berkualitas rendah dan kurang mampu melanjutkan ke perguruan tinggi. Akibatnya, produktivitas tenaga kerja bisa lebih rendah daripada mereka yang memiliki pendapatan yang tinggi. Todaro dan Smith juga menjelaskan bahwa untuk menganalisis ketimpangan dapat diukur dengan menggunakan gini ratio dimana angkanya berkisar antara 0-1 yang digunakan sebagai ukuran ketimpangan agregat suatu wilayah.

Pembangunan ekonomi suatu negara dinyatakan berhasil jika terjadinya pertumbuhan ekonomi diiringi dengan berkurangnya ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan terjadi apabila sebagian besar penduduk memperoleh pendapatan yang rendah dan pendapatan yang besar hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan merupakan dua unsur yang penting dalam proses pembangunan. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa diantara kedua aspek tersebut seringkali terjadi *trade off* antara satu dan lainnya, yaitu bilamana mendahulukan pemerataan maka akan cenderung memperlambat proses pertumbuhan (Sjafrizal, 2008).

Sebagai salah satu provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dengan 21 Kabupaten dan 3 Kota didukung oleh data Produk Domestik Regional Bruto mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Indonesia. Hal ini disebabkan karena lapangan usaha utama seperti sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta pengangkutan dan komunikasi tetap berperan sebagai pendorong utama. Tetapi, walaupun memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, ketimpangan pendapatan di beberapa provinsi Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir masuk dalam provinsi di Indonesia dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang paling tinggi.

Hal ini juga dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:



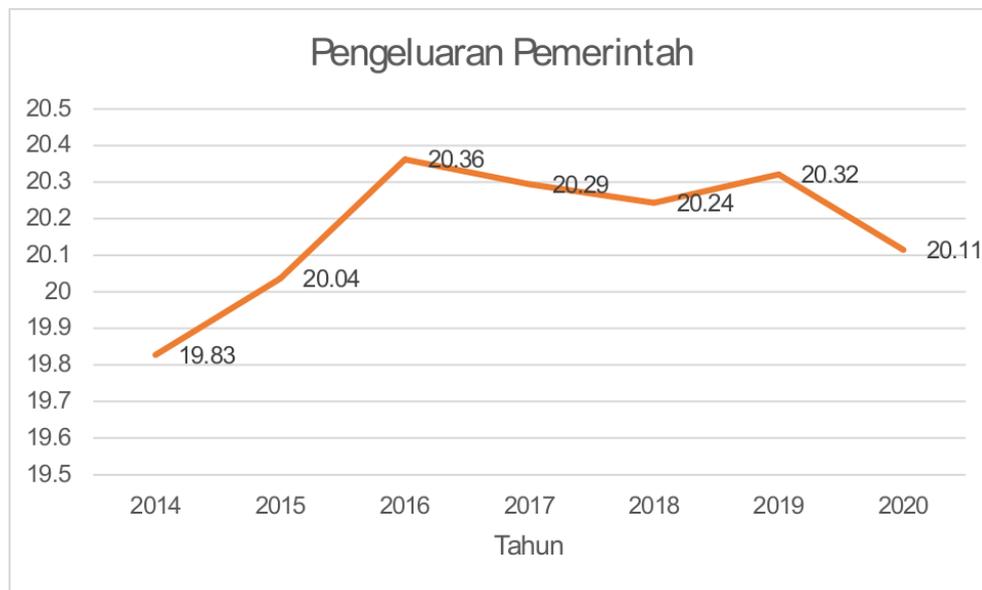
Sumber : Badan Pusat Statistik (2014 – 2020)

Gambar 1.1 Perkembangan *Gini Ratio* di Provinsi Sulawesi Selatan

Klasifikasi pemerataan berdasarkan Koefisien Gini (KG) merupakan ukuran ketidakmerataan agregat yang memiliki nilai antara 0 (kemerataan sempurna) sampai dengan 1 (ketidakmerataan sempurna) bila nilai KG dari suatu negara berkisar antara 0,50-0,70 berarti ketidakmerataan tinggi, bila KG berkisar antara 0,36-0,49 berarti ketidakmerataan sedang, dan bila KG berkisar 0,20-0,35 berarti ketidakmerataan rendah.

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan Gini Ratio pada provinsi Sulawesi Selatan memiliki kecenderungan (trend) yang stagnan dalam periode 2014 sampai 2020 yang cenderung berada dalam klasifikasi ukuran ketidakmerataan sedang yaitu berkisar antara 0,36 – 0,49, Pada tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan yaitu dari 0,40 ke 0,38, dan pada tahun 2018 ke 2019 mengalami stagnan yaitu 0,37 dan pada tahun 2020 gini ratio mengalami kenaikan yaitu 0,40 . Perkembangan gini ratio pada beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang

kurang signifikan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pertumbuhan angkatan kerja dan investasi.



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun (2014-2020)

Gambar 1.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan

Salhab dan Soedjono (2012) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja langsung untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek-proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, jumlah belanja langsung pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu Rp. 20.32 dan gini ratio mengalami penurunan menjadi 0.389 begitu pula tahun lainnya.

Secara teori, peningkatan jumlah belanja modal pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat *gini ratio*, namun berdasarkan data yang diperoleh sebaliknya. Jumlah belanja modal pemerintah pada setiap provinsi di pulau Sulawesi mengalami peningkatan dan *gini ratio* juga

mengalami peningkatan setiap tahunnya di provinsi Sulawesi Selatan Pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam mengelola dan mengembangkan sektor publik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika pemerintah banyak melakukan pengeluaran yang berorientasi ke sarana dan prasarana atau infrastruktur publik maka sektor-sektor perekonomian pun akan saling bergerak dalam mempermudah kegiatan ekonomi. Begitupula sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang baik bagi setiap manusia bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah.



Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Diolah

Gambar 1.3 Perkembangan Investasi Sulawesi selatan

Investasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Investasi menurut Mnankiw (2006) ialah komponen GDP (Gross Domestic Product) yang mengaitkan masa kini dan masa depan. Menurut data pada tahun 2016 jumlah investasi meningkat tetapi gini ratio juga mengalami peningkatan, dimana ivestasi meningkat

menjadi Rp 14.56 tetapi gini juga meningkat menjadi 0.426. investasi dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

Menurut Aprilianto, Bayu dkk (2014) menunjukkan bahwa adanya investasi yang dilakukan di suatu daerah, baik itu asing (PMA) maupun domestik (PMDN) akan mengakibatkan penyerapan tenaga kerja sehingga proses produksi menjadi produktif. Investasi asing di dalam masyarakat pertama-tama akan sangat membantu dan menambah kesempatan kerja, sehingga pendapatan masyarakat pun bertambah begitu juga dalam jaringan yang lebih luas dimana akan menambah pendapatan nasional suatu negara. Meratanya investasi di setiap daerah yang dapat dirasakan oleh masyarakat akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga kemudian akan memperkecil kesenjangan pendapatan yang terjadi antar daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dianggap perlu untuk mengadakan penelitian mengenai **“Determinan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Selatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka akan disajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah alokasi belanja langsung pemerintah berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi?

2. Apakah investasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka akan disajikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh alokasi belanja langsung pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sampai 2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 hingga 2020.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya yang bertemakan Ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan investasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro.2006).

Menurut Kuznet (dalam hidayat, 2016) ketimpangan dalam pembagian pendapatan cenderung semakin besar selama tahap-tahap awal pembangunan, setelah tahap awal yang berganti ke tahap-tahap lebih lanjut dari pembangunan terbalik menjadi lebih kecil. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan ekonomi pada tahap awal mengalami proses kemerosotan yang cukup besar dalam pembagian pendapatan yang baru terbalik menuju tingkat pemerataan yang lebih besar dalam pembagian pendapatan pada tahap pembangunan lebih lanjut. Dalam kurva yang ditunjukkan oleh Kuznet, menunjukkan bahwa dalam jangka pendek terdapat korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan ketimpangan pendapatan, sebaliknya dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif.

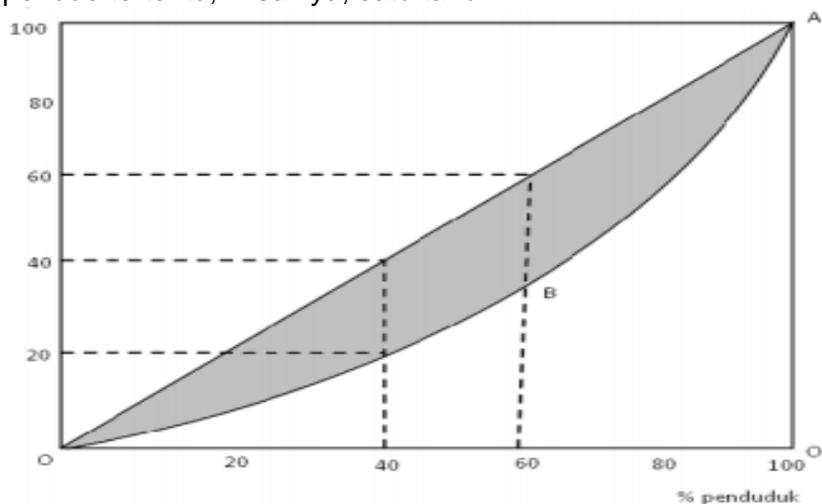
Ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses pertumbuhannya. Karenanya, tidaklah mengherankan ketimpangan itu pastinya selalu ada, baik itu di Negara miskin, negara sedang berkembang, bahkan negara maju sekalipun. Hanya saja yang membedakan adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing negara tersebut.

Peningkatan pendapatan perkapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Seringkali di negara-negara berkembang dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal daripada tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan.

Terdapat berbagai macam alat yang dapat dijumpai dalam mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan (*Distribution Income Disparities*). Ketimpangan pendapatan merupakan ketimpangan relatif pendapatan antar golongan masyarakat yang diukur dengan *Gini Ratio* dan *Kurva Lorenz*. Dari segi penyebabnya, Todaro dalam Suyana Utama (2009) mengatakan, kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan di negara yang sedang berkembang disebabkan oleh: a) pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita,

b) ketidakmerataan pembangunan antar daerah, c) inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proposional dengan penambahan produksi barang-barang, d) investasi.

Kurva Lorenz secara umum sering digunakan untuk menggambarkan bentuk ketimpangan yang terjadi terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima selama periode tertentu, misalnya, satu tahun.



Kurva Lorenz digambarkan pada sebuah bidang persegi/bujur sangkar dengan bantuan garis diagonalnya. Garis horizontal menunjukkan persentase penduduk penerima pendapatan, sedangkan garis vertikal adalah persentase pendapatan. Semakin dekat kurva ini dengan diagonalnya berarti ketimpangan semakin rendah dan sebaliknya semakin melebar kurva ini menjauhi diagonal berarti ketimpangan yang terjadi semakin tinggi.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi pada saat ini menjadi salah satu syarat mutlak apabila suatu wilayah ingin mengalami pertumbuhan ekonomi. Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat digambarkan dari kemampuan daerah tersebut mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi setiap daerah berbeda-beda, ini dikarenakan potensi sumber daya alam setiap daerah berbeda-beda sehingga faktor produksi setiap daerah juga berbeda. Sumber daya alam dan faktor produksi setiap daerah ini mengarah ke Produk Domestik Bruto (PDRB), yaitu jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006).

Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar dikembangkan oleh Evsey Domar dan R.F. Harrod. Dalam teori Harrod-Domar, untuk menumbuhkan suatu perekonomian diperlukan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Inti dari teori Harrod-Domar yaitu, setiap perekonomian dapat menyisihkan

suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi investasi baru sebagai stok penambah modal (Todaro, 2013).

Todaro dan Smith (2006) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian secara terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar. Ada tiga komponen utama dalam menentukan pertumbuhan ekonomi setiap bangsa, yaitu;

Akumulasi modal, meliputi semua bentuk investasi baru yang ditanamkan seperti tanah, peralatan fisik, serta sumber daya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan keterampilan. Pertumbuhan jumlah penduduk, yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja. Kemajuan teknologi, yang diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan pekerjaan. Akumulasi modal diperoleh bila sebagian dari pendapatan yang diterima saat ini ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan meningkatkan output dan pendapatan di masa yang akan datang. Pengadaan pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan dan bahan baku dan meningkatkan stok modal (*capital stock*) dan tingkat output yang ingin dicapai. Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus ditopang oleh berbagai investasi penunjang yang disebut dengan investasi infrastruktur sosial dan ekonomi. Pengadaan infrasturuktur ini meliputi pembangunan jalan, penyediaan energi listrik, penyediaan sarana air bersih, perbaikan sanitasi,

pembangunan fasilitas komunikasi, dan sebagainya. Keseluruhan dari adanya penyediaan infrastruktur ini sangat dibutuhkan dalam menunjang dan mengintegrasikan aktivitas-aktivitas ekonomi dalam suatu negara.

2.1.3 Belanja Langsung Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah versi Keynes merupakan salah satu unsur permintaan agregate. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa $Y = C + I + G + (X - M)$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1996).

Teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. (1) Tahap awal, pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (2) Tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. (3) Tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-

pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat (Mangkoesoebroto, 2001).

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata melalui belanja negara baik itu belanja rutin maupun belanja pembangunan.

Menurut Basri dan Subri (2003), pengeluaran pemerintah itu sangat bervariasi, namun secara garis besarnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap masa yang akan datang. Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas dan menyebarkan daya beli luas.

Kunarjo (1996) mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan antara permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Pengeluaran pemerintah yang terus berkembang mengakibatkan penerimaan negara harus ditingkatkan. Hal ini berarti bahwa pemerintah harus dapat menggali sumber-sumber penerimaannya yang sebagian besar berasal dari pajak.

Walaupun secara keseluruhan pengeluaran pemerintah sangat penting dalam sumbangannya terhadap pendapatan nasional, tetapi yang lebih penting lagi adalah penentuan komposisi dari pengeluaran

pemerintah tersebut. Komposisi dari pengeluaran merupakan strategi untuk mencapai sasaran dari pembangunan nasional. Berdasarkan komposisi dari pengeluaran tersebut akan terjawab suatu pertanyaan yaitu pengeluaran mana yang kiranya lebih diprioritaskan apakah pengeluaran rutin harus lebih besar dari pengeluaran pembangunan atau sebaliknya.

2.1.4 Investasi

Investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah modal serta memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi yang terkonsentrasi hanya di beberapa daerah akan menjadi salah satu faktor penyebab adanya ketimpangan mendapatkan profit yang menjanjikan yang akan dilirik oleh para investor dalam negeri maupun luar negeri. Investasi menurut Mankiw (2006) adalah komponen GDP (Gross Domestic Product) yang mengaitkan masa kini dan masa depan.

Menurut Sultan dan Jazmani (2010) realita di negara berkembang dalam pembangunan terdapat kemajuan yang tidak merata antar daerah atau dengan kata lain terdapat tingkatan ketimpatan antar daerah. Seperti yang terjadi di Indonesia, secara geografis wilayah terdiri atas kepulauan menyebabkan tekonsentrasinya kegiatan ekonomi ke wilayah pusat pemerintah dan pertumbuhan. Tidak meratanya tingkatan pertumbuhan ekonomi diberbagai daerah disebabkan oleh: Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah Alokasi investasi yang tidak merata Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah Perbedaan Sumber Daya Alam

(SDA) antar wilayah Perbedaan kondisi geografis antar wilayah Kurang lancarnya perdagangan antar provinsi.

Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam pembangunan ekonomi karena investasi mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan dalam proses produksi barang dan jasa meningkat yang pada gilirannya akan menyerap angkatan kerja. Sehingga tenaga kerja tersebut memperoleh upah dan tenaga kerja tersebut mempunyai daya beli. Dengan semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan produksi barang jasa, dimana tenaga kerja dapat diserap lebih banyak juga sehingga terjadi pemerataan pendapatan perkapita.

Dalam teori Investasi Harr-Domar, pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui akumulasi tabungan. Menurut Harrod-Domar, pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Menurut teori Harrod-Domar, untuk meningkatkan laju perekonomian, maka diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok tambahan modal.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Belanja langsung Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan

Peran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan fiskal, pada tingkat nasional tergambar melalui APBN dan pada tingkat daerah diwujudkan melalui APBD daerah bersangkutan. Kebijakan ekonomi pada skala daerah yang diikuti dengan kebijakan keuangan daerah merupakan implementasi desentralisasi fiskal sebagai wujud desentralisasi pembangunan di Indonesia. Pendekatan desentralisasi pada bidang fiskal dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun indikator-indikator makroekonomi seperti; pertumbuhan ekonomi serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di setiap daerah (Sabir, 2015)

Belanja langsung, yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Keberadaan anggaran belanja langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Varian jumlah komponen belanja langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mengurangi ketimpangan (disparity). Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat

kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Seringkali di negara-negara berkembang dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal dari pada tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan.

Todaro (2004), menggambarkan ketimpangan dengan mempertimbangkan hubungan antara tingkat pendapatan perkapita dan tingkat ketimpangan pendapatan untuk Negara maju dan sedang berkembang. Dan menggambarkan ketimpangan pendapatan Negara-negara tersebut dalam tiga kelompok dimana pengelompokan ini disesuaikan dengan tinggi, sedang dan rendahnya tingkat pendapatan yang diukur menurut koefisien gini dan tingkat PDRB.

2.2.2 Belanja langsung Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi

Peran pemerintah dalam mengatur pengeluarannya merupakan instrument penting untuk mengendalikan perekonomian. Banyak ekonom berpendapat bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan endogen (Barro, 1990) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah yang produktif akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan. Salah satu pengeluaran

pemerintah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah belanja modal berupa penyediaan infrastruktur seperti listrik, transportasi, pendidikan dan kesehatan, guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sabir, 2015)

Kebijakan APBD merupakan gambaran keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya pada aspek belanja daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan pengeluarannya dalam bentuk belanja daerah yang lebih efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat daerah bersangkutan, terutama pada sektor-sektor pembangunan daerah yang memiliki nilai strategis dalam menciptakan efek multiplier yang tinggi. Untuk itu efisiensi dan efektivitas peran pemerintah menurut Tiebout (1956) dapat dicapai karena pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakatnya, mereka akan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal daripada pemerintah pusat. Korelasi ini juga ditunjukkan oleh Keynes dalam Mankiw (2007) dan Djohanputro (2008), bahwa belanja modal (investasi sektor publik) akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja melalui *multiplier effect*.

Sedangkan menurut Keynes pengeluaran pemerintah adalah salah satu permintaan agregat yang dimana jika permintaan agregat meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana yang akan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

2.2.3 Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Adelman dan Morris dalam Subandi (2016) melihat bahwa yang menyebabkan ketimpangan pendapatan ialah investasi yang lebih banyak pada proyek-proyek padat modal, yang dimana membutuhkan modal yang lebih banyak dan tenaga kerja yang sedikit atau lebih membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas. Hal ini menyebabkan persentase pendapatan modal kerja tambahan lebih besar dibandingkan persentase pendapatan yang didapat dari kerja itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan pengangguran.

Pertambahan jumlah barang modal memungkinkan perekonomian menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Sebagai salah satu komponen pembentuk Produk Domestik (PDRB), Investasi menempati posisi penting dalam mendorong perekonomian daerah (Damaik dkk, 2018). Investasi dipercaya dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga kesempatan para pekerja akan semakin luas dan tentunya akan mengurangi angka pengangguran dan lebih pemeratakan ketimpangan pendapatan.

Sedangkan menurut Smith dalam bukunya *wealth of nation* berpendapat bahwa investasi ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan akan sepenuhnya diinvestasikan. Smith juga memiliki pandangan bahwa yang dapat membuat pembangunan ekonomi meningkat adalah pemupukan modal yang dimana pemupukan modal ini akan membuat tingkat upah meningkat. Ini menandakan bahwa semakin banyak tabungan yang masuk maka akan membuat tingkat investasi semakin tinggi yang membuat banyaknya lapangan kerja yang terbuka untuk masyarakat dan akan membuat ketimpangan pendapatan semakin merata di kalangan masyarakat (Jhingan, 2000).

2.2.4 Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Investasi juga akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi. Harrod-Domar memberikan peranan kunci kepada investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Lewat peningkatan kapasitas produksi maka pendapatan dan penawaran agregat akan tercipta. Adanya investasi berupa pembelian barang modal dan pelengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian sehingga hal ini dapat meningkatkan PDB riil Indonesia dan dengan demikian akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Tri Handayani, 2011).

Dalam teori Investasi Harrod-Domar (Arsyad, 1997), pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Menurut Harrod-Domar, pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga meningkatkan laju perekonomian, maka diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok tambahan modal. Berdasarkan teori tersebut yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa bertambahnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut akan meningkat karena adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif sehingga ketimpangan pendapatan akan berkurang. Peningkatan investasi akan meningkatkan

kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru, pada tahap selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran sehingga dapat memperkecil angka ketimpangan pendapatan (Adrian Sutawijaya, 2010).

2.3 Penelitian Terdahulu

Ni Luh Putu Yuni Adipuryanti dan I Kuntut Sudibia (2015), Adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tidak meratanya jumlah tenaga kerja dan investasi pada suatu daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh secara langsung maupun tidak langsung jumlah penduduk yang bekerja dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dari tahun 2007-2013. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi non partisipan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa jumlah penduduk yang bekerja dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel mediasi dalam pengaruh tidak langsung jumlah penduduk yang bekerja dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Fafan Triastanto (2015) dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2012. Variabel independennya adalah Pertumbuhan ekonomi, UMR, Jumlah Penduduk. Variabel dependennya adalah Indeks Williamson. Metode analisis data menggunakan metode regresi panel. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga variabel independen tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2001-2012.

I Gusti Ayu Putri Wahyuni, Made Sukarsa, Nyoman Yuliarmi. Pengaruh pengeluaran pemerintah dan Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2000 sampai 2012. Menggunakan data sekunder, metode pengumpulan data, menggunakan metode pengumpulan observasi nonparticipation, serta metode analisis jalur path analysis. Pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif terhadap kesenjangan pendapatan.

Devi Retnosari (2010) dengan judul Analisis pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Variabel independennya adalah Indeks Gini, Jumlah Penduduk, PMDN, PMDA. Variabel dependennya adalah PDRB. Metode analisis data menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi, variabel jumlah

penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi, PMDN, dan PMA juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Khairul Amri (2016) yang berjudul Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Panel Data 8 Provinsi di Sumatera. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Data yang digunakan adalah data panel dari 8 provinsi di Sumatera selama periode tahun 2007-2015. Peralatan analisis data yang digunakan adalah panel vector autoregression (PVAR) dan panel granger causality test. Penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode tahun tertentu secara signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Ketimpangan pendapatan pada periode tahun tertentu juga secara signifikan dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan tahun sebelumnya. Hasil panel granger causality menemukan adanya unidirectional causality dari ketimpangan pendapatan ke pertumbuhan ekonomi.

Merri Anitasari dan Ahmad Soleh, (20) yang berjudul Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu periode 2001-2012. Menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis ekonometrik dengan SPSS 16. Penelitian mengemukakan bahwa dari jumlah 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, kabupaten Rejang Lebong dan kota Bengkulu yang memiliki hasil bahwa pengeluaran positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Kabupaten Bengkulu Utara

memiliki pengaruh yang negatif sedangkan 7 kabupaten lainnya memiliki hasil yang positif namun tidak signifikan.

Diah Pradnyadewi, Ida Bagus Putus Purbadharmaja, (2015) yang berjudul Pengaruh IPM, biaya infrastruktur, Ivestasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali Tahun 2008 hingga 2015. Penelitian ini berbentuk kuantitatif dan bersifat asosiatif jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan data sekunder. Metode pengumpulan data digunakan metode pengumpulan data observasi non partisipan dengan teknik analisis jalur atau path analysis. IPM berpengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, sedangkan biaya infrastruktur dan investasi tidak memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Biaya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung pada ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan IPM serta investasi tidak memiliki pengaruh pada ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali. IPM serta biaya infrastruktur memiliki pengaruh pada ketimpangan distribusi pendapatan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

Ferry sutiono (2018) pengaruh belanja pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan di jawa timur (studi kasus kabupaten/kota di jawa timur tahun 2010-2015). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja modal kementerian/ lembaga dan pengaruh belanja modal APBD pada ketimpangan pendapatan di jawa timur. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi data panel dengan mengambil populasi 38 kabupaten/kota di provinsi jawa timur dalam kurun waktu 2010-

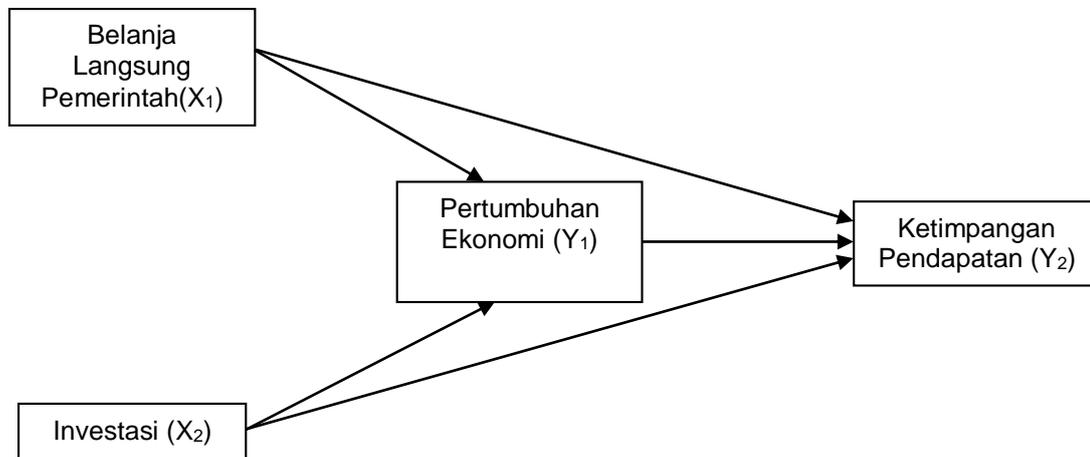
2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal k/l berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Sedangkan belanja modal APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur.

Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Wahyuni (2014) dengan judul "Pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di provinsi Bali" dengan menggunakan data *time series* dengan variabel independen investasi dan pengeluaran pemerintah di provinsi Bali. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan dan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di provinsi Bali. Sedangkan investasi sendiri memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di provinsi Bali.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran dalam penelitian analisis ketimpangan pendapatan masyarakat di provinsi Sulawesi Selatan, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah (1) pertumbuhan penduduk, (2) pertumbuhan ekonomi, (3) Investasi dan (4) ketimpangan pendapatan. Variabel-variabel tersebut dimaksudkan untuk lebih mengarahkan peneliti untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dari pemaparan tersebut

maka dapat dibuat kerangka konseptual penelitian sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian pada gambar 2.1 maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga alokasi belanja langsung pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.
2. Diduga Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.